



Bacaan latar belakang untuk workshop bertema:

Menuju Kelapa Sawit Bebas Deforestasi di Indonesia: Tantangan Implementasi untuk HCV dan HCS

Jakarta, 12 Desember 2014

Diterbitkan oleh:

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) dan Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD)

Dengan dukungan teknis dari:

Daemeter Consulting

Publikasi ini dibuat sebagai bacaan awal untuk lokakarya berjudul “Menuju Kelapa Sawit Bebas Deforestasi di Indonesia: Tantangan Implementasi untuk HCV dan HCS” di Jakarta, Indonesia, tanggal 12 Desember 2014

Walaupun segala upaya telah dilakukan untuk memastikan akurasi informasi yang dipaparkan dalam publikasi ini, tidak ada jaminan bahwa tidak ada kekeliruan atau kekurangan. Penulis dan penerbit tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami siapa pun yang bertindak atau tidak bertindak berdasarkan materi yang tersedia dalam publikasi ini.

Publikasi ini mencakup:

1. Pendekatan HCV dan HCS untuk implementasi Zero Deforestation: Pengantar kesamaan, perbedaan, tantangan dan kesempatan oleh Daemeter Consulting
2. Halangan dan hambatan: Meningkatkan praktik manajemen inovatif di sektor kelapa sawit Indonesia oleh Daemeter Consulting, yang dilengkapi tiga ringkasan studi kasus dari *Praktik pengelolaan terbaik dalam industri kelapa sawit Indonesia: Studi kasus* oleh Daemeter Consulting dan satu ringkasan studi kasus dari *Golden Agri demonstrates real commitment to HCS forest conservation but legal threat lies ahead* oleh Greenomics Indonesia
3. Ringkasan dari *Sawit di Indonesia: Tata kelola, pengambilan keputusan, dan implikasi bagi pembangunan keberlanjutan: Rangkuman bagi pengambil keputusan dan pelaku* oleh The Nature Conservancy (TNC) dan Daemeter Consulting

Pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam publikasi ini mewakili pandangan penulis dan bukan penerbit.

Foto berasal dari Daemeter Consulting

Pertama kali diterbitkan di Jakarta, Desember 2014

Pendekatan HCV dan HCS untuk Penerapan Zero Deforestation: Pengantar kesamaan, perbedaan, tantangan, dan kesempatan



Ada pertumbuhan luar biasa dalam komitmen berkelanjutan di sektor kelapa sawit sepanjang dua tahun terakhir. Semakin banyak produsen dan pelaku rantai pasokan hilir berkomitmen untuk menghasilkan atau membeli 100% kelapa sawit berkelanjutan yang tersertifikasi, dan pelaku rantai pasokan terkemuka berjanji untuk bertindak melampaui sekadar sertifikasi dan mendapatkan sumber produk “tanpa deforestasi, tanpa gambut, tanpa eksploitasi”. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa usaha kelapa sawit merespons tuntutan perubahan dari konsumen, dan juga membuktikan bahwa industri sedang bertransformasi. Namun, banyak pengamat mengungkapkan kekhawatiran bahwa menjamurnya komitmen dan perangkat yang dipromosikan berisiko menciptakan kebingungan dan melemahkan momentum, ketika perusahaan-perusahaan ini berusaha menentukan—Jalan menuju keberlanjutan mana yang harus ditempuh?

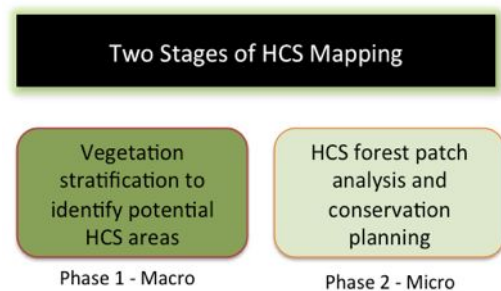
Semakin populernya penilaian stok karbon tinggi/ *High Carbon Stock (HCS)* untuk melengkapi pendekatan nilai konservasi tinggi/ *High Conservation Value (HCV)* mengilustrasikan kebingungan yang ditimbulkan tren terkini. HCV dan HCS terkandung digambarkan sebagai alternatif; di waktu lain, kedua hal ini digambarkan berlebihan. Kedua pandangan ini mencerminkan kebingungan, terutama akan apa yang berusaha dicapai kedua pendekatan ini dan perbedaan di antaranya. Ada tiga pertanyaan penting yang perlu disoroti – *Bagaimana HCV dan HCS berkontribusi pada Zero Deforestation? Apakah komitmen pada satu pendekatan secara efektif menjaga pendekatan lainnya? Apakah HCV dan HCS dapat digabungkan menjadi satu proses terintegrasi untuk mencapai pemenuhan keberlanjutan dalam satu perangkat?*

Penjelasan singkat ini bertujuan untuk (i) menggambarkan HCV dan HCS; (ii) menyoroti beberapa perbedaan di antaranya dan kesempatan untuk menggabungkan keduanya; (iii) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi kedua pendekatan ini untuk mengurangi atau mengeliminasi deforestasi; dan (iv) memberi saran untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

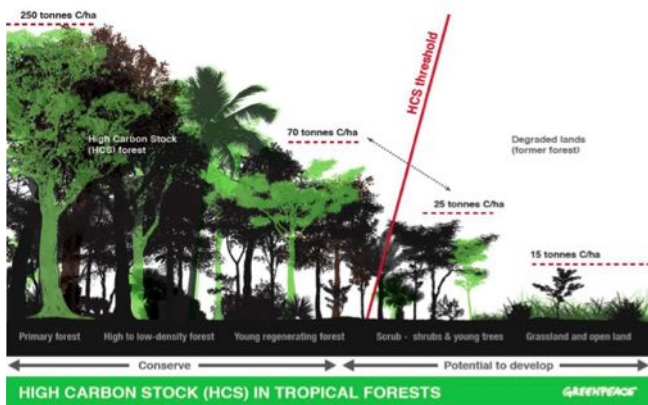
Apa yang dimaksud dengan pemetaan HCS?

Pendekatan HCS dikembangkan pada tahun 2011 oleh Golden Agri-Resources Ltd (GAR) berkolaborasi dengan Greenpeace dan The Forest Trust (TFT) untuk menerapkan Kebijakan Konservasi Hutan (Forest Conservation Policy /FCP) GAR. Dengan FCP, GAR berkomitmen pada Zero Deforestation di semua perkebunan baru, selain melindungi HCV dan menghindari gambut. Untuk melaksanakan FCP, GAR memerlukan definisi hutan, perangkat pemetaan praktis, dan proses untuk memutuskan area mana yang akan dikembangkan yang konsisten dengan Zero Deforestation.

Gambar 1 Tahapan pemetaan HCS

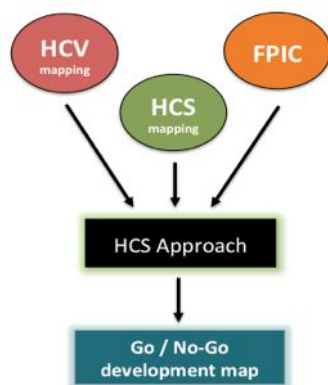


Terlepas dari nama yang diusung, HCS bukanlah perangkat pemetaan karbon, tetapi proses dua langkah yang terstruktur (Gambar 1) untuk

Gambar 2 Stratifikasi vegetasi untuk pemetaan HCS

(i) memetakan tutupan vegetasi yang menentukan area hutan berpotensi HCS, dan (ii) melaksanakan verifikasi lapangan dan analisis petak untuk membatasi area HCS yang mungkin dikembangkan dan daerah lainnya yang harus dilindungi.

Fase 1 Pemetaan HCS dimulai dengan analisis GIS dan penginderaan jauh untuk melakukan pemetaan “level makro” vegetasi di atas tanah dengan menggunakan sistem stratifikasi seperti di Gambar 2. Hutan alam dipetakan sebagai ‘Hutan kelas 1, 2, atau 3’ berdasarkan struktur dan kondisi kanopi, diikuti belukar tua (young secondary forest), belukar muda (scrub forest), padang rumput dan lahan terbuka. Pada tahapan ini, area yang terpetakan sebagai Hutan Kelas 1-3 atau belukar tua dianggap berpotensi HCS dan diperuntukan untuk dilindungi. Survei lapangan kemudian memverifikasi pemetaan dan melakukan survei cepat keanekaragaman hayati pada petak yang telah ditentukan dalam penilaian. Fase 2 pemetaan HCS ‘level mikro’ menggunakan pohon keputusan terstruktur untuk menentukan kelayakan

Gambar 3 Skema pendekatan HCS

petak yang dijadikan kandidat perlindungan HCS dengan memperhitungkan ukuran, bentuk, jarak ke blok hutan yang lebih besar, ketersambungan dan kemungkinan operasional

Pemetaan HCS adalah satu dari tiga masukan yang sangat penting dalam proses pembuatan keputusan lengkap yang lebih komprehensif yang disebut “Pendekatan HCS” (Gambar 3). Pendekatan HCS memperhitungkan tak hanya pemetaan HCS tapi juga tindakan konservasi yang diperlukan untuk melindungi HCV dan hak masyarakat dan mata pencaharian di bawah proses Persetujuan Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC). Hasil akhir pendekatan HCS adalah peta Go/No-Go yang memastikan Nol Deforestasi berdasarkan HCS, tanpa kehilangan nilai yang sangat penting menurut HCV, serta pengakuan dan dihormatinya hak masyarakat dan penghidupan yang mungkin terkena dampak upaya perlindungan hutan.

Pendekatan HCS dan pemetaan HCS yang menjadi masukannya sekarang dipantau dan dikoordinasi oleh kelompok multi-pihak HCS Approach Steering Group, yang saat ini sedang mengembangkan struktur tata kelolanya. Perangkat HCS yang mendefinisikan metodologi pemetaan HCS dan pendekatan HCS yang lebih lengkap untuk menentukan area Go/No-Go sedang disusun dan akan dipublikasikan pada awal tahun 2015.

Apa yang dimaksud dengan pemetaan HCV?

Konsep HCV dikembangkan pada tahun 1999 oleh Forest Stewardship Council (FSC) sebagai ketentuan utama standar FSC dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Sejak itu, konsep ini mulai dikenal secara global sebagai pendekatan praktis untuk menyeimbangkan tujuan produksi dan perlindungan lintas lanskap, dan banyak digunakan di berbagai sektor sumber daya alam dan standar keberlanjutan. Sebagai contoh, HCV merupakan pendekatan utama Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk minyak sawit berkelanjutan, yang mengharuskan produsen melindungi daerah yang diperlukan untuk mengelola pemeliharaan satu atau lebih HCV yang ada di perkebunan mereka.

Gambar 4 Enam Nilai Konservasi Tinggi (HCV)

HCV 1 - Concentrations of Biodiversity
HCV 2 - Large Natural Landscapes
HCV 3 - Rare or Endangered Ecosystems
HCV 4 - Critical Environmental Services
HCV 5 - Basic Livelihood Needs
HCV 6 - Cultural Identity

Pendekatan HCV bertujuan membantu pengelola lahan mencapai tujuan produksi tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial dan lingkungan yang penting di lanskap tersebut. Hal ini melibatkan proses dua langkah: (1) mengidentifikasi daerah-daerah yang mendukung nilai-nilai sosial, budaya atau biologis yang luar biasa penting (kawasan HCV); dan (2) mengembangkan rencana pengelolaan yang didukung pemangku kepentingan, termasuk area yang disisihkan untuk dikonservasi, yang memungkinkan produksi berlangsung sambil memastikan nilai-nilai penting tetap dipertahankan.

Global HCV Toolkit untuk memandu implementasi HCV dikembangkan pada tahun 2003. Sejak saat itu, beberapa dokumen panduan telah dikembangkan¹. Ada 18 interpretasi nasional Global Toolkit di seluruh dunia yang memberikan pedoman lebih terperinci dan relevan dengan konteks nasional. Indonesia mengembangkan Toolkit nasional pertama pada tahun 2003, dan merevisinya pada tahun 2008. Di Toolkit ini, Indonesia mendefinisikan enam kelas besar HCV (Gambar 4) dan berbagai sub-nilai di dalamnya.

Proses HCV meliputi enam langkah (Gambar 5) yang menggabungkan pengumpulan data sekunder dan primer, konsultasi dengan masyarakat lokal dan

para pihak (termasuk tenaga ahli independen dari luar), dan survei lapangan untuk mengumpulkan informasi lapangan, verifikasi pemetaan dan menguji kelayakan usulan pengelolaan untuk memelihara HCV dalam lanskap. Hasil identifikasi, perencanaan pengelolaan dan pemantauan HCV disajikan dalam laporan yang harus disampaikan kepada para pemangku kepentingan setempat untuk mendapatkan masukan sebelum finalisasi area Go/No-Go.

Seperti HCS, pemetaan hutan dan tutupan lahan terkini merupakan masukan yang sangat penting dalam penilaian HCV yang kredibel, meskipun dalam beberapa kasus telah menjadi kelemahan di penilaian yang telah lalu – hal ini harus distandardisasi dan diperbaiki. Bagaimana pun, perlu dicatat bahwa tidak seperti HCS, HCV tidak selalu melarang konversi hutan alam, kecuali jika perlindungan hutan diperlukan untuk mempertahankan satu atau lebih HCV di perkebunan dan lanskap sekitarnya

HCV diatur oleh kelompok multi-pihak HCV Resource Network (www.hcvnetwork.org) yang mengawasi skema lisensi penilai (Assessor Licensing Scheme/ ALS) yang baru saja diluncurkan untuk menyediakan lisensi, memantau, dan memverifikasi standar kinerja penilai berlisensi.²

Kesimpulan utama

Pemetaan HCV dan HCS bersifat melengkapi dan tidak saling bersaing. HSC menekankan pemetaan tutupan lahan untuk mengidentifikasi hutan untuk perlindungan dan menghindari deforestasi yang disebabkan oleh komoditas. HCV menggunakan pendekatan berbasis nilai, digabungkan dengan pemetaan hutan dan ekosistem, untuk menentukan wilayah alami yang diperlukan untuk pengelolaan untuk mempertahankan nilai sosial dan lingkungan yang penting

Gambar 5 Enam langkah proses penilaian HCV

Sumber: Proforest (2008) Good Practice Guidance for HCV Assessments

¹ Lihat <https://www.hcvnetwork.org/resources/resources/folder.2006-09-29.6584228415>

² <https://www.hcvnetwork.org/als/apply-become-licensed-hcv-assessor>

Gambaran selanjutnya dari HCV dan HCS yang saling melengkapi tercermin dari bagaimana Pendekatan HCS (Gambar 3) secara eksplisit bergantung pada penetapan masukan pemetaan HCV untuk menentukan wilayah akhir Go/No Go untuk perkebunan.

Sekarang ini, pemetaan HCV dan HCS dilakukan secara terpisah oleh ahli yang berbeda dan digabungkan sesudahnya. Keduanya dapat diintegrasikan ke dalam satu proses. Contohnya, Tahap 1 pemetaan HCS (makro) dapat digunakan sebagai masukan perencanaan penilaian HCV, kemudian kerja lapangan untuk verifikasi HCV dan HCS dapat dilakukan bersama untuk memaksimalkan sinergi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas. Kemudian, pembuatan keputusan untuk wilayah yang akan dilindungi di bawah HCV dan di bawah HCS (yaitu Tahap 2, analisis petak) dapat dilakukan secara terpisah menggunakan logika masing-masing pendekatan, kemudian direkonsiliasi sebagai satu peta untuk menentukan peta akhir Go/No Go.

Uji coba di lapangan untuk menggabungkan pemetaan HCV dan HCS menjadi satu perangkat penilaian terintegrasi merupakan prioritas penting untuk kerja di masa depan

Tantangan bersama dalam penerapan HCV dan HCS

Pada praktiknya, HCV dan HCS sama-sama menghadapi serangkaian tantangan teknis, hukum, praktis, dan manajemen untuk pelaksanaan di lapangan yang sukses.

HCV dan HCS menghadapi serangkaian tantangan teknis yang sama:

- Bagaimana melengkapi pemetaan tutupan lahan menggunakan metode standar dan landasan data bersama untuk mendapatkan keluaran yang konsisten dan meyakinkan dengan biaya yang masuk akal (misalnya landsat, GFW, fotografi udara).
- Bagaimana memverifikasi parameter di lapangan yang memerlukan survei lapangan (misalnya keanekaragaman hayati, kebutuhan dan aspirasi masyarakat, kondisi hutan) dengan biaya dan kualitas yang masuk akal.
- Bagaimana meningkatkan jumlah praktisi berkualifikasi untuk melengkapi penilaian dengan biaya yang masuk akal dan berkomitmen

untuk menghasilkan pelaporan yang transparan dan berkualitas baik.

HCV dan HCS menghadapi serangkaian tantangan hukum yang sama:

- Kerangka kerja hukum dan regulasi Indonesia tidak mengizinkan perlindungan wilayah pelestarian hutan yang luas dalam perkebunan kelapa sawit.
- AMDAL memiliki dasar hukum yang kuat tetapi HCV dan HCS tidak diperhitungkan dalam AMDAL, dan rekomendasi untuk mitigasi dalam AMDAL biasanya sangat berbeda dengan HCV/HCS.
- ISPO tidak mensyaratkan perlindungan HCV/HCS seperti yang dijelaskan dalam komitmen Zero Deforestation.

HCV dan HCS menghadapi serangkaian tantangan praktis yang sama:

- Bagaimana menyelesaikan konflik ketika penghidupan masyarakat terancam oleh pelestarian hutan yang disyaratkan oleh HCV atau HCS.
- Bagaimana mengaplikasikan HCV/HCS sebagai perangkat praktis untuk menyeimbangkan produksi dan perlindungan di wilayah kaya hutan di mana pengembangan kelapa sawit baru dimulai (misalnya, Papua).
- Saat ini, usaha pelestarian hutan di perkebunan membutuhkan biaya tinggi, tapi hanya menghasilkan sedikit manfaat langsung untuk perusahaan atau masyarakat. Ini perlu berubah.

HCV dan HCS menghadapi serangkaian tantangan pengelolaan yang sama:

- Ada banyak tekanan pada hutan yang disisihkan dalam wilayah perkebunan, bukan hanya untuk konversi ke kelapa sawit. Bagaimana cara menangani hal ini dengan efektif?
- Tantangan praktis pengelolaan pelestarian hutan yang disisihkan di wilayah perkebunan sangat besar, tetapi sektor swasta memiliki pengalaman yang sangat terbatas, yang berarti kapasitas terbatas, untuk melakukannya dengan efektif.
- Ada kesempatan untuk menetapkan pengelolaan bersama wilayah HCV/HCS melalui kemitraan perusahaan-masyarakat, tapi bagaimana mencapai ini pada praktiknya?

Mengatasi tantangan bersama untuk menerapkan HCV dan HCS

Tindakan-tindakan di bawah ini direkomendasikan untuk mengatasi tantangan bersama dalam implementasi HCV dan HCS di masa depan:

- Mengusahakan integrasi AMDAL dengan penilaian HCV/HCS sukarela, sehingga rekomendasi mitigasi selaras dan menyediakan dasar hukum yang lebih kuat untuk perlindungan wilayah di dalam perkebunan.
- Mengusahakan integrasi penilaian HCV/HCS untuk lanskap dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disyaratkan untuk perencanaan tata ruang dan program pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten.
- Mengembangkan perangkat dan landasan data berbasis situs web bersama untuk sumber daya geospasial dan sumber daya lain untuk memfasilitasi penilaian yang baik, hasil yang konsisten, dan pelaporan yang transparan dengan biaya yang lebih rendah.
- Membentuk Kelompok Belajar industri untuk melakukan uji coba (contoh, menggabungkan HCV/HCS menjadi perangkat terintegrasi), membagi dan mendiskusikan tantangan dan keberhasilan, dan memfasilitasi kerja sama untuk mengatasi kesulitan bersama dan mempromosikan pembelajaran bersama.
- Mengembangkan program peningkatan kapasitas berskala besar untuk memperkuat kapasitas manajemen dan pengawasan, terutama di sektor swasta.
- Mengembangkan, menguji dan memperbaiki model manajemen bersama perusahaan-masyarakat yang efektif atas wilayah yang disisihkan dalam perkebunan.
- Mengeksplorasi cara mengintegrasikan tindakan pelestarian hutan yang disyaratkan HCV/HCS dengan program pengurangan emisi nasional dan sub-nasional, terutama REDD+ dan FREDDI, untuk memobilisasi insentif positif untuk pelestarian.
- Melakukan kampanye peningkatan kesadaran kelapa sawit berkelanjutan berskala besar, terkoordinasi, dan sesuai target untuk membangun konstituensi domestik Zero Deforestation yang mendukung reformasi kebijakan.

Untuk pertanyaan atau informasi lebih lanjut, hubungi Gary Paoli (gary.paoli@daemeter.org) atau Neil Franklin (neil.franklin@daemeter.org).

Referensi

Greenpeace (2014) The HCS Approach: No Deforestation in practice. Identifying High Carbon Stock (HCS) Forest for Protection (10 March 2014). Tersedia di http://www.greenpeace.org/international/Global/international/briefings/forests/2014/HCS%20Approach_Breifer_March2014.pdf

Paoli, Gary (2014) Protecting High Carbon Stocks and High Conservation Values in palm oil: Complementary or competing approaches? Opini di Better Palm Oil Debate. Tersedia di <http://betterpalmoildebate.org/features/post.php?s=2014-06-12-protecting-high-carbon-stocks-and-high-conservation-values-in-palm-oil-complementary-or-competing-approaches>

Proforest (2008) Good practice guidelines for High Conservation Value assessments A practical guide for practitioners and auditors. Tersedia di <https://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/HCV%20good%20practice%20-%20guidance%20for%20practitioners.pdf>

Rosoman, Grant (2014) High Carbon Stock Approach – No Deforestation in Practice. Invited presentation at the Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) 12th Roundtable meeting, in Kuala Lumpur, Malaysia, 17-20 November 2014. Tersedia di http://www.rt12.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/1_Grant%20Rosoman.pdf

Halangan dan hambatan Meningkatkan praktik manajemen inovatif di sektor kelapa sawit Indonesia



Industri kelapa sawit Indonesia sedang mengalami perubahan bisnis yang mendasar. Dorongan dan kampanye di dalam maupun luar negeri telah menciptakan tuntutan besar bagi produsen untuk menangani dampak sosial dan lingkungan – dan mereka merespon tuntutan ini. Semakin banyak perusahaan yang menjadikan mitigasi dampak sebagai inti strategi investasi dan kegiatan mereka. Hal ini mencerminkan perubahan yang sedang berlangsung dalam cara pikir perusahaan, di mana keberlanjutan dipandang sebagai sumber inovasi dan bernilai untuk citra perusahaan, bukan biaya produksi. Tren ini baik dan perlu dihargai, namun cakupan dan pergerakannya perlu dipercepat untuk mencapai transformasi industri secara keseluruhan untuk memastikan adanya keberlanjutan.

Dalam dokumen singkat ini, kami memaparkan bagaimana perusahaan kelapa sawit membuat lompatan dalam pengembangan Praktik Pengelolaan Terbaik (Best Management Practices, atau BMP) yang dapat menjadi model untuk dikembangkan. Kami juga menggambarkan halangan dan hambatan utama upaya peningkatan BMP ini serta praktik manajemen inovatif lainnya. Untuk mencapai hal ini, perlu dilakukan upaya yang terkoordinasi terutama terkait pelatihan, peningkatan pengetahuan dan penyebaran informasi, jaringan pembelajaran yang terstruktur, reformasi kebijakan, dan insentif bagi industri dan pemerintah daerah untuk mengadopsi praktik-praktik ini.

Praktik Pengelolaan Terbaik yang Inovatif

Perkebunan dan pabrik kelapa sawit merupakan kegiatan agro-industri yang terpadu, besar, dan kompleks yang terhubung dengan masyarakat, perekonomian, dan bentang alam di sekitarnya. Praktik yang baik untuk memitigasi dampak di satu aspek dapat membawa manfaat positif di aspek lain, sama seperti praktik buruk dapat berdampak

negatif di kegiatan lain. Menyadari hal ini, banyak perusahaan mulai mengadopsi pendekatan manajemen yang holistik untuk mendapatkan manfaat dan penghematan biaya yang berlipat ganda dari peningkatan mitigasi dampak sosial, lingkungan, tingkat produksi, dan emisi yang saling menguatkan.

Sebagai bagian dokumen latar belakang ini, kami akan memberikan ringkasan praktik terbaik yang dilakukan oleh keempat anggota Indonesian Palm Oil Pledge.

- Studi Kasus 1. Asian Agri Group – Memperkuat koperasi petani kecil**
 Asian Agri, melalui anak perusahaannya PT Inti Indosawit Subur, telah mengembangkan program yang maju untuk memperkuat pengembangan kelembagaan, pengelolaan keuangan, dan keuntungan jangka panjang koperasi petani kecil (plasma) di Riau dan Jambi. Program yang telah mendapatkan penghargaan ini berhasil meningkatkan penghidupan pedesaan dan membangun nilai-nilai bersama dalam kemitraan perusahaan-masyarakat.
- Studi Kasus 2. Cargill – Peningkatan hasil**
 Cargill meningkatkan hasil kelapa sawit mentah (CPO) di perkebunannya dengan signifikan melalui penerapan BMP berbiaya rendah yang sangat efektif yang memungkinkan lebih banyak kelapa sawit diproduksi dari lahan yang sama. Praktik-praktik ini meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya, dan mengoptimalkan penggunaan lahan, dan jika diterapkan dengan luas oleh perusahaan-perusahaan lain berpotensi mengurangi tekanan konversi hutan atau kawasan bernilai lainnya sambil tetap mendorong produksi untuk memenuhi permintaan CPO yang meningkat.

- **Studi Kasus 3. Golden Agri Resources – Menghilangkan deforestasi**

Sejak 2010, GAR telah menerapkan Forest Conservation Policy untuk menghilangkan deforestasi di semua perkebunan kelapa sawitnya yang baru. Dengan bekerja sama dengan LSM dan mitra-mitra lain, GAR telah mengembangkan alat High Carbon Stock (HCS) yang melesat menjadi standar industri untuk pelaksanaan komitmen Bebas Deforestasi, atau Zero Deforestation.

- **Studi Kasus 4. Wilmar International – Konservasi keanekaragaman hayati**

Wilmar telah mengembangkan kebijakan, prosedur, alat, program pelatihan, dan kolaborasi untuk mengidentifikasi, mengelola, memantau dan melaporkan kondisi daerah konservasi keanekaragaman hayati yang diprioritaskan dalam perkebunan kelapa sawitnya. Banyak alat-alat ini yang disebarluaskan untuk diterapkan oleh perusahaan-perusahaan lain, dan dengan demikian membantu industri mengatasi hambatan teknis dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Studi kasus BMP di masa depan oleh anggota IPOD dan pelaku industri lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong pembelajaran bersama tentang inovasi untuk memitigasi dampak akan membantu memperbaiki praktik-praktik di aspek-aspek lain, seperti FPIC; prosedur penyelesaian sengketa; identifikasi dan tidak dikembangkannya daerah yang sensitif secara sosial dan lingkungan; uji tuntas investasi yang bertanggung jawab untuk menghindari daerah berisiko tinggi; dan kepemimpinan di sektor publik lokal yang inovatif untuk meningkatkan tata kelola kelapa sawit di tingkat kabupaten.

Halangan dan hambatan perubahan

Untuk meningkatkan penggunaan praktik pengelolaan terbaik, hambatan-hambatan di lima hal berikut perlu diatasi. Empat di antaranya diilustrasikan di Gambar 1.

Pengetahuan dan sumber daya manusia

Salah satu halangan utama perubahan adalah lambatnya laju informasi mengenai BMP yang telah terbukti yang dikembangkan industri. Hal ini menciptakan kesenjangan pengetahuan yang semakin melebar di antara perusahaan yang memiliki

sumber daya untuk berinovasi dan perusahaan lain. Laju informasi yang terhambat ini mencerminkan kompetisi antar perusahaan yang membuat mereka tidak ingin berbagi serta keengganan perusahaan untuk menggembargemborkan keberhasilan mereka karena khawatir dijadikan target kampanye negatif. Jaringan pembelajaran yang terstruktur sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan ini dan mempercepat transfer pengetahuan melalui pertukaran antar teman sejawat di semua tingkat tata kelola perusahaan. Tantangan terkait lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia untuk menerapkan praktik-praktik inovatif secara luas. Perusahaan mengalami kesulitan dalam menarik dan mempertahankan cukup banyak pegawai dengan keahlian yang diperlukan untuk menerapkan program-program baru. Perlu dilakukan upaya bersama untuk melatih staf yang ada dan mendidik tenaga kerja baru dengan keahlian pengelolaan lingkungan dan pelibatan masyarakat. Pusat dan program pelatihan sedang dan perlu terus dikembangkan dengan dukungan semua pihak.

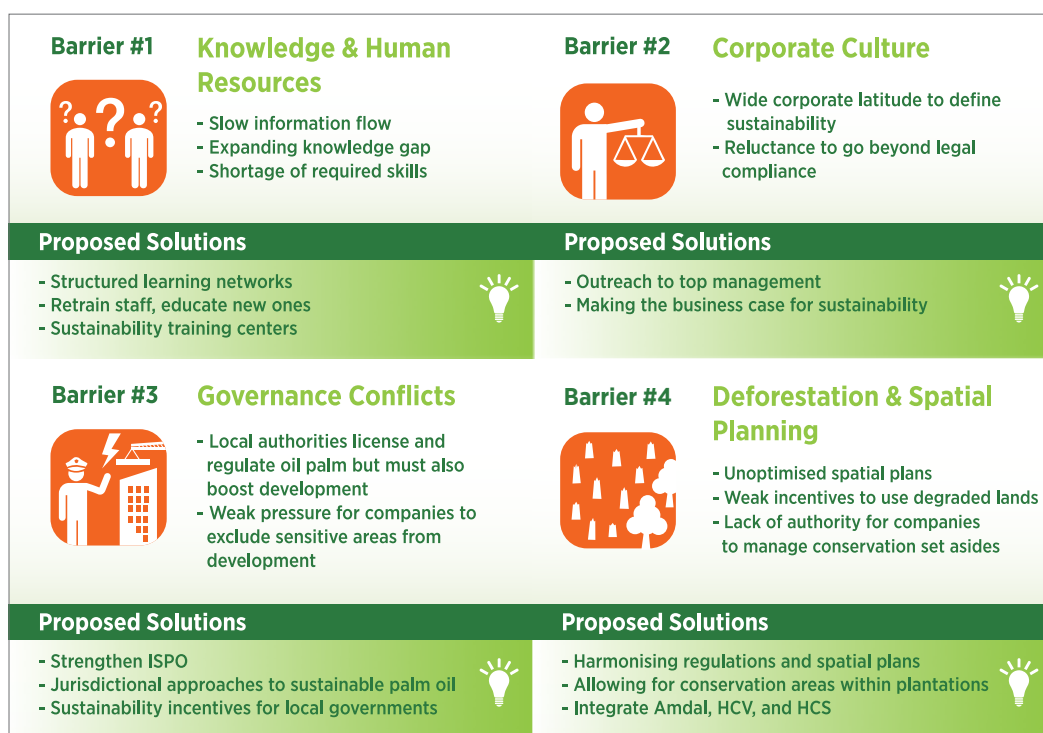
Budaya perusahaan

Sistem tata kelola kelapa sawit di Indonesia saat ini memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk mendefinisikan visi keberlanjutan mereka. Hal ini menciptakan tantangan dalam peningkatan inovasi ketika misalnya manajemen senior perusahaan belum mendukung keberlanjutan. Sistem ini juga membawa kesempatan yang cukup unik untuk membentuk kebijakan keberlanjutan di perusahaan-perusahaan besar dengan mengubah cara berpikir para pengambil keputusan. Ketika para pimpinan menerima bahwa pemenuhan tuntutan pemangku kepentingan memerlukan tindakan yang melampaui kepatuhan terhadap aturan hukum, akan terbuka kesempatan-kesempatan baru untuk membentuk sasaran keberlanjutan yang ambisius. Perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan mode-mode penjangkauan yang efektif untuk memberanikan para pimpinan perusahaan mengambil tindakan lugas untuk mengadopsi keberlanjutan sebagai prinsip utama dan merubah kegiatan operasional yang diperlukan untuk menerapkan visi mereka.

Tanggung jawab dan insentif tata kelola yang bertanggung

Di bawah sistem tata kelola kelapa sawit yang terdesentralisasi di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang besar untuk memberi ijin kegiatan pengembangan, meloloskan AMDAL dan menegakkan peraturan. Mereka juga mengalami

Gambar 1 Halangan dan hambatan untuk meningkatkan penggunaan BMP yang inovatif



tekanan untuk meningkatkan pendapatan dari kelapa sawit dan mempercepat laju pembangunan. Dihadapkan dengan tanggung jawab dan insentif ini, pemimpin pemerintah lokal terkadang menoleransi pelaku usaha yang buruk karena mereka membawa investasi, sementara pelaku yang bertanggung jawab menghadapi kesulitan memenuhi komitmen keberlanjutan (misalnya untuk melindungi hutan dalam perkebunan) yang dipandang pemerintah daerah menghambat pertumbuhan. Ini menghalangi keberlanjutan dan perlu ditangani sebelum inovasi konservasi dapat ditingkatkan dengan signifikan. Diskusi akhir-akhir ini mengenai pendekatan berdasarkan daerah yurisdiksi berpotensi menjadi solusi, tetapi hanya jika pemerintah daerah mendapatkan insentif dan dihargai untuk dukungannya terhadap isu keberlanjutan.

Kesenjangan tata kelola

Kapasitas penegakan peraturan pemerintah daerah sering sangat dibatasi oleh kurangnya pengetahuan dan sumber daya, yang diperburuk dengan batasan anggaran dan tekanan untuk mendukung pembangunan. Munculnya sertifikasi pihak ketiga di bawah ISPO merupakan upaya untuk menyebarkan beban penegakan peraturan ini, namun walaupun penegakan peraturan menjadi tanggung jawab pemerintah, industri sebenarnya tetap dapat

mengatur dirinya sendiri dan menanggung hasil pembangunan baik yang positif dan negatif. Dengan kondisi seperti ini, peran utama pemerintah dalam memandu pengembangan kelapa sawit adalah melalui perencanaan tata ruang, pajak, dan kebijakan pembangunan, sementara peran perusahaan adalah menetapkan bagaimana kerangka peraturan diterapkan di lapangan. Nilai-nilai dan tata kelola perusahaan sangat penting dalam hal ini, yang menyoroti kebutuhan untuk menutup kesenjangan jika ada antara budaya perusahaan dan tuntutan konsumen.

Deforestasi dan perencanaan tata ruang

Banyak bagian kerangka peraturan Indonesia yang memperkuat keberlanjutan, namun ada juga yang bertentangan dengan norma-norma BMP yang sedang berkembang. Perusahaan-perusahaan yang sedang mengembangkan bisnis mereka semakin ditekan untuk mengadopsi kebijakan Bebas Deforestasi dan membuat perkebunan baru di lahan yang rendah karbon. Ada banyak lahan semacam ini di Indonesia, tetapi kebanyakan tidak bisa dikembangkan karena peraturan perencanaan tata guna lahan mendelineasi sebagian besar lahan ini sebagai Kawasan Hutan, di mana kegiatan perkebunan tidak diijinkan. Selain itu, produsen kelapa sawit juga ditekan untuk mengelola hutan

yang disisihkan untuk dikonservasi di perkebunan untuk memitigasi jejak deforestasi. Peraturan yang berlaku sangat mempersulit perusahaan untuk mempertahankan wewenang pengelolaan di daerah yang tidak ditanami dalam perkebunan mereka. Kebijakan-kebijakan ini merupakan hambatan yang signifikan untuk pengembangan kelapa sawit berdampak rendah – terutama Bebas Deforestasi – dan perlu menjadi prioritas utama kegiatan advokasi.

Menyusun insentif untuk mengatasi halangan dan hambatan

Kerangka tata kelola kelapa sawit yang kompleks di Indonesia membingungkan pelaku utama dalam hal standar kinerja sosial dan lingkungan. Hal ini diperumit lagi oleh keinginan pemangku kepentingan setempat, kelompok masyarakat sipil, dan konsumen yang sering kontradiktif. Di sini kami memaparkan dengan singkat langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memberikan insentif yang jelas positif dan negatif untuk kinerja yang lebih baik kepada dua pelaku utama – dunia usaha dan pemerintah.

Produsen memerlukan panduan peraturan dan kebijakan yang jelas mengenai karakteristik lahan yang dapat dijadikan perkebunan, bagaimana persyaratan untuk mengembangkan dan mengelola perkebunan untuk memenuhi standar minimum, dan kepastian bahwa semua produsen akan dituntut memenuhi standar ini dan diberikan sanksi untuk ketidakpatuhan. Potensi manfaat finansial adopsi BMP dalam hal kepatuhan, hasil yang meningkat, pengurangan konflik sosial, dan akses ke market harus dikomunikasikan dengan jelas di seluruh industri. Organisasi dalam industri, mungkin dengan dukungan donor, perlu mengembangkan panduan-panduan teknis untuk membimbing produsen dalam upaya melakukan BMP dan memberikan dukungan teknis melalui pelatihan dan mentor antar bisnis. Pelaku rantai pasokan di hulu dan investor dapat memberikan tekanan positif dan negatif kepada produsen untuk mengadopsi BMP melalui kesepakatan kontrak, dan masyarakat sipil dapat mendukung proses ini melalui advokasi dan, dalam beberapa kasus, dukungan teknis (misalnya dalam hal hubungan dengan masyarakat atau pengelolaan hutan HCV dan HCS).

Pemerintah pusat perlu mengharmonisasi berbagai elemen kerangka peraturan dan hukum di sektor kelapa sawit untuk menetapkan standar kinerja yang jelas. Prosedur terkait perencanaan tata ruang dan terutama deliniasi Kawasan Hutan perlu dilakukan

dengan efektif dan secepatnya. Persyaratan manajemen lingkungan di beberapa kerangka hukum perlu dikonsolidasi dan diselaraskan untuk mengurangi beban peraturan bagi produsen dan pemerintah daerah. Harmonisasi kerangka hukum adalah tugas yang panjang dan kompleks, tetapi kebijakan presiden dan dialog politik dapat mencapai hasil yang signifikan dalam waktu singkat. Tindakan-tindakan spesifik mencakup: (1) pengawasan yang lebih ketat terhadap keputusan pemberian izin oleh pemerintah daerah dan praktik-praktik terkait peraturan di sektor ini; (2) mengeluarkan panduan bagaimana pemimpin daerah dapat menyeimbangkan perluasan kelapa sawit dengan pembangunan berkelanjutan; (3) dukungan teknis untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan tugas terkait peraturan; dan (4) sistem terpusat untuk memantau tutupan hutan di daerah perkebunan dan mendisiplinkan produsen yang tidak memenuhi persyaratan mitigasi dampak. Pemerintah Indonesia memiliki banyak insentif untuk mengambil langkah-langkah ini untuk memenuhi sasaran pengurangan deforestasi dan emisi sambil tetap mempertahankan pertumbuhan produksi kelapa sawit yang sehat.

Pemerintah daerah memainkan peran terbesar dalam hal peraturan dalam membentuk hasil-hasil lingkungan dan sosial di lapangan. Tindakan-tindakan mereka didorong oleh struktur insentif yang sangat berbeda, sebagai penyokong pembangunan ekonomi di satu sisi dan pengawas industri di sisi lain. Panduan-panduan nasional yang dibahas di atas perlu mencakup standar kinerja yang jelas serta insentif/disinsentif untuk pencapaian keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan yang tepat di tingkat daerah. Jelas ada potensi dalam hubungan dengan REDD+ dan FREDDI di sini. Pemerintah daerah perlu juga memberikan standar kinerja yang jelas, peraturan yang transparan untuk proses pemberian izin dan lain-lain, dan perlakuan yang setara dalam hal penghargaan dan sanksi untuk semua produsen. Di aspek-aspek di mana kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi fungsi regulator sangat terbatas, mereka perlu memberikan dukungan kepada masyarakat setempat dan produsen yang memiliki hubungan dengan penduduk lokal. Mungkin insentif terbesar bagi pemerintah daerah untuk mendukung penerapan BMP dan kinerja lingkungan dan sosial yang lebih baik adalah potensi untuk mendapatkan pengakuan di tingkat daerah dan nasional dan dikenal secara politik. Hal ini merupakan insentif positif di masa depan yang perlu diteliti.

Studi Kasus 1: Pemberdayaan petani kecil kelapa sawit melalui sponsor dan dukungan perusahaan perkebunan Asian Agri Group



Perusahaan-perusahaan kelapa sawit berkontribusi terhadap pembangunan pedesaan melalui berbagai cara. Selain peningkatan infrastruktur, penyediaan layanan sosial, dan kontribusi bersifat amal, perusahaan-perusahaan secara langsung mendukung pengembangan usaha pertanian kelapa sawit skala kecil. Skema kemitraan petani hadir dalam beragam bentuk, tetapi selalu mencakup dukungan operasional, teknis, dan finansial dari perusahaan untuk memproduksi tandan buah segar (TBS) yang dijual ke pabrik yang mensponsori para petani. Ketika skema plasma berhasil, dampak positif pada ekonomi pedesaan bisa jadi transformatif. Ketika gagal, dampak sosial dan lingkungannya bisa negatif dan bertahan lama.

Secara umum, manfaat pengembangan program plasma ditentukan oleh kinerja koperasi petani yang didesain untuk mendukung program tersebut. Dalam sebagian besar perjanjian plasma, lembaga koperasi menyediakan jasa tani yang penting, termasuk: (i) memastikan harga yang adil untuk TBS petani kecil yang dijual ke pabrik, (ii) mengantarkan TBS ke pabrik dengan tepat waktu dan aman untuk mempertahankan kualitas, (iii) memastikan para petani mendapatkan akses pada pupuk dan input lain (seperti benih berkualitas baik), (iv) menyediakan posisi-tawar menawar yang koheren dengan perusahaan (seperti mengenai syarat dan ketentuan transaksi bisnis), dan (v) memfasilitasi diversifikasi bisnis melalui pelatihan, akses kredit, dan layanan pendukung lainnya. Koperasi sering gagal menjalankan satu atau lebih dari fungsi-fungsi tersebut, karena kepemimpinan yang gagal, sistem manajemen yang buruk, tidak adanya transparansi, kepentingan golongan elit, dan kolusi antara pemimpin koperasi dengan perusahaan.

Mengingat tekanan yang diberikan koperasi yang gagal pada hubungan perusahaan dengan

masyarakat dan risiko bisnis yang timbul, semakin banyak perusahaan yang menginvestasikan waktu dan tenaga dalam kesuksesan dan keberlanjutan kemitraan petani kecil sebagai strategi jangka panjang utama untuk membangun nilai bersama. Studi kasus ini menggambarkan program pendukung petani kecil yang sudah memenangkan penghargaan di bawah pimpinan PT Inti Indosawit Subur, anak perusahaan Asian Agri Group, untuk mendukung peningkatan kapasitas, pengembangan kelembagaan, pengelolaan keuangan, dan keuntungan jangka panjang petani kecil (plasma) dan koperasi mereka di provinsi Riau dan Jambi. Bagi Asian Agri, penyediaan dukungan teknis, kelembagaan, dan finansial kepada petani kecil merupakan bagian integral model produksi. Mereka mendukung lebih dari 29.000 petani kecil dengan total area tanam 60.200 ha yang dikelola lebih dari 80 koperasi unit desa.

Melalui penyediaan materi tanam dengan hasil produksi tinggi yang bersertifikasi; bantuan teknis untuk penanaman, perawatan pohon, dan praktik pengelolaan hasil; pelatihan mengenai pengelolaan hama, mencakup metode bebas kimia; perawatan jalan; akses kredit; dan pelatihan terstruktur yang terus berjalan untuk membangun kapasitas kelembagaan dan manajemen koperasi-koperasi yang ada – program ini diakui kesuksesan komersialnya untuk petani, pencapaian keberlanjutan di bawah standar RSPO dan ISCC, dan mendapatkan pengakuan di tingkat nasional sebagai koperasi pertanian teladan. Studi kasus ini memberikan pelajaran penting dalam peningkatan hasil petani skala kecil dan dapat menjadi model untuk diadopsi industri.

Laporan lengkap studi kasus praktik pengelolaan terbaik dapat diunduh di www.daemeter.org.

Studi Kasus 2:

Praktik pengelolaan terbaik untuk meningkatkan hasil dan mengurangi dampak keanekaragaman hayati, lingkungan, dan iklim

Cargill Corporation



Hasil kelapa sawit per hektar rata-rata di Indonesia hanya sedikit meningkat sejak tahun 1970-an. Hasil yang terealisasi masih jauh di bawah potensi maksimum, dan secara rata-rata hanya sekitar setengah dari hasil yang dicapai perusahaan Indonesia yang paling progresif dalam menerapkan Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk meningkatkan hasil dengan biaya rendah. Jika diadopsi oleh seluruh industri, hasil PPT berpotensi mengurangi tekanan untuk mengubah 1,6 juta hektar tanah menjadi perkebunan baru hingga 2050, namun dengan tetap memenuhi proyeksi kenaikan permintaan. PPT didesain untuk: (a) mengurangi kerugian buah saat panen; (b) mempertahankan kesehatan pohon; dan (c) mengendalikan penggunaan pupuk dan kelembapan tanah.

Cargill, perusahaan makanan besar yang berpusat di Amerika, memimpin dalam eksperimen dan peningkatan serta mendorong PPT melalui uji lapangan di perkebunan mereka di Indonesia selama dekade terakhir. Uji coba ini menunjukkan bahwa bukan saja hasil bisa naik nyaris dua kali lipat dari kondisi awal, tetapi bahwa hasil yang tinggi mungkin dicapai bahkan di tanah marjinal, memperlihatkan bahwa lahan kritis bisa dibudidayakan dan berpotensi mengurangi tekanan pada kawasan hutan yang padat karbon dan kaya akan keanekaragaman hayati. Pengalaman penerapan PPT menunjukkan bahwa jumlah pupuk yang diperlukan untuk memproduksi satu kilogram CPO dapat jauh dikurangi dari standar di bisnis saat ini, dan dengan demikian mengurangi jejak emisi gas rumah kaca (GRK) produksi kelapa sawit.

Perusahaan-perusahaan yang menerapkan PPT, antara lain Cargill, Golden Agri-Resources, Ltd, dan PT Astra Agro Lestari, terus memantau dan menganalisis kinerja hasil dan menemukan cara untuk meningkatkannya lebih jauh lagi, menikmati laba investasi yang tinggi dengan mendorong hasil tambahan. Namun, sekalipun PPT menghasilkan banyak manfaat finansial dan lingkungan, kebanyakan perusahaan kelapa sawit dan petani kecil belum mengadopsinya, karena harga komoditas yang tinggi dan ketersediaan lahan di masa lalu kurang memberikan tekanan untuk menanamkan modal yang diperlukan untuk infrastruktur, pelatihan staf, dan kapasitas pengelolaan. Namun demikian, insentif untuk mengadopsi PPT saat ini semakin besar, di tengah pasar CPO yang melemah, menurunnya ketersediaan lahan, dan meningkatnya biaya pengembangan perkebunan baru. Asosiasi industri dan perusahaan yang progresif dapat mempercepat laju adopsi melalui bantuan teknis, jaringan pembelajaran bersama, dan penghargaan berdasarkan kinerja. Pemerintah dapat mendorong pengadopsian yang lebih luas dengan menentukan standar hasil, seperti melalui pelaksanaan ketentuan-ketentuan PPT di ISPO. Tetapi, pada akhirnya implementasi akan bergantung pada pembuatan keputusan operasi perusahaan-perusahaan itu sendiri.

Laporan lengkap studi kasus praktik pengelolaan terbaik dapat diunduh di www.daemeter.org.

Studi Kasus 3: Penggunaan HCS dalam pelaksanaan kebijakan Zero Deforestation dan implikasi hukumnya Golden Agri Resources



Banyak perusahaan dan pembeli kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir menyatakan komitmen yang lebih kuat dalam isu keberlanjutan. Golden Agri Resources (GAR) merupakan salah satu pemain paling awal dengan diluncurkannya Forest Conservation Policy pada bulan Februari 2011 untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan sesudahnya tidak berjejak deforestasi, atau Zero Deforestation. Bersama The Forest Trust (TFT) dan Greenpeace, GAR mengembangkan dan menguji coba metodologi untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi hutan dengan stok karbon tinggi, atau High Carbon Stock, untuk dikonservasi. Metodologi HCS yang dipublikasikan bulan Juni 2012 ini menjadi dasar pelaksanaan komitmen pengembangan tanpa deforestasi GAR.

Dengan menggunakan metode ini, pada bulan Maret 2013 GAR mengumumkan konservasi hutan HCS di delapan konsesi di mana sedang dilakukan penanaman di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Luas total konsesi-konsesi ini mencapai 127.847 hektar, termasuk 80 persen area yang bisa ditanami menurut pertimbangan faktor-faktor biofisika. Sekitar 19.000 hektar dari konsesi ini diidentifikasi sebagai hutan HCS.

Sebuah analisis spasial terbaru yang independen yang menggunakan citra satelit terkini menunjukkan bahwa sebagian besar hutan HCS di tujuh dari delapan konsesi GAR ini cukup terlindungi. Di satu konsesi di Kalimantan Tengah, ada blok-blok hutan HCS yang telah hilang karena berbagai faktor. Pada umumnya, upaya konservasi GAR sampai saat ini cukup berhasil, walaupun tentunya masih ada yang bisa diperbaiki.

Walaupun begitu, masa depan hutan HCS ini kurang pasti karena seperti daerah Nilai Konservasi Tinggi (HCV), perlindungan hutan HCS di perkebunan tidak terakomodasi dengan baik di bawah peraturan Indonesia yang berlaku. Sejak diluncurkannya uji coba konservasi hutan HCS GAR pada bulan Maret 2013, perusahaan telah berupaya aktif untuk mendorong pemerintah untuk mengakui HCS sebagai alat dan menciptakan kerangka kebijakan yang lebih mendukung konservasi hutan di konsesi kelapa sawit, tapi belum ada banyak kemajuan.

Tantangan baru bahkan muncul dengan disahkannya Undang-undang Perkebunan pada bulan September 2014, yang menyebutkan bahwa semua daerah yang dapat ditanami dalam sebuah konsesi harus dikembangkan dalam enam tahun setelah dikeluarkannya HGU. Jika peraturan ini tidak diubah, sekitar 19.000 hektar hutan HCS di perkebunan GAR mungkin bisa dicabut ijinnya oleh negara dalam waktu beberapa tahun.

Konsekuensi yang tidak diinginkan ini dapat dihindari melalui peraturan pelaksana UU Perkebunan ini. Peraturan tersebut misalnya akan mendefinisikan 'kerusakan lingkungan' yang harus dihindari di bawah UU ini. Jika pembukaan hutan HCS (atau HCV) didefinisikan sebagai kerusakan lingkungan, maka daerah-daerah ini harus dilindungi. Karena peraturan-peraturan ini belum ada, masih ada kesempatan bagi para pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan.

Laporan Greenomics Indonesia ini dapat diunduh di www.greenomics.org

Studi kasus 4:

Mengurangi dampak kelapa sawit pada keanekaragaman hayati melalui pendekatan konservasi yang komprehensif

Wilmar International



Selama 20 tahun terakhir, banyak hutan Indonesia telah dikonversi menjadi lahan pertanian, termasuk perkebunan kelapa sawit. Tren ini kemungkinan akan berlanjut sepanjang dekade mendatang untuk memenuhi target pertumbuhan produksi kelapa sawit Indonesia. Dampak perluasan di masa lalu pada keanekaragaman hayati telah menarik banyak perhatian di tingkat nasional dan internasional dan menjadi tekanan pada perusahaan untuk mempertimbangkan faktor ini ketika menetapkan lokasi, mendesain, dan mengelola perkebunan dan pabrik mereka. Dampak pengembangan perkebunan pada keanekaragaman hayati amat bervariasi, bergantung pada lokasi perkebunan yang menentukan: (1) apakah ekosistem alami akan terkena dampak; (2) kondisi dan kelangkaan habitat yang terkena dampak; dan (3) kepentingan ekologis wilayah tersebut di skala lanskap, misalnya dalam mempertahankan keterhubungan antara kawasan lindung atau penyediaan jasa hidrologi.

Perusahaan perkebunan dapat mengurangi dampak di lokasi dengan mengidentifikasi dan mengelola kawasan berhabitat penting, mempertahankan jasa ekosistem utama, atau menyediakan rute penyebaran untuk satwa dalam perkebunan. Ketika perusahaan berkomitmen, mereka harus menginvestasikan sumber daya manusia dan finansial yang signifikan untuk merencanakan, mengelola, dan memantau wilayah konservasi yang disisihkan dan menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan tugas ini dengan daerah operasi lain. Usaha konservasi keanekaragaman hayati dapat didukung kemitraan multi-pihak dengan masyarakat setempat, pemerintah daerah, kelompok masyarakat sipil, dan pengguna lahan yang berbatasan. Namun demikian, perusahaan tetap menghadapi tantangan berat karena pendekatan dan acuan standar untuk pengelolaan keanekaragaman hayati di perkebunan masih dikembangkan, dan sebagian kebijakan pemerintah Indonesia menyulitkan penanam kelapa sawit dalam menerapkan tindakan efektif. Perusahaan

perkebunan besar cenderung lebih bersedia untuk bereksperimen dengan konservasi keanekaragaman hayati dibandingkan dengan perkebunan yang lebih kecil dalam mengembangkan standar-standar industri baru dan memastikan terbukanya akses ke pasar yang sensitif.

Salah satu perusahaan yang melakukan hal ini adalah Wilmar International Ltd. Wilmar mencontohkan usaha yang dilakukan produsen kelapa sawit untuk melestarikan keanekaragaman hayati di perkebunan, dan melalui kolaborasi dengan komunitas konservasi, mereka mengembangkan perangkat, acuan, dan standar praktik industri yang baik. Pengalaman yang diberikan Wilmar menjadi pelajaran berharga bagi industri dan pelaku lain yang berusaha untuk mengurangi dampak kelapa sawit pada keanekaragaman hayati. Karena persyaratan sertifikasi wajib ISPO akan diterapkan beberapa tahun lagi, semua perusahaan akan diharuskan untuk mengusahakan pengurangan dampak pada keanekaragaman hayati. Elemen-elemen penting agenda aksi untuk membangun momentum ini dan meningkatkan hasil di masa depan adalah: (a) menyelaraskan persyaratan hukum dan insentif untuk mendukung konservasi; (b) merevisi rencana tata ruang untuk menghindari perijinan di kawasan hutan dan memfokuskan pengembangan di masa depan di daerah yang terdeforestasi, rendah karbon, dan miskin keanekaragaman hayati; (c) menciptakan dan mendorong penggunaan perangkat dan standar pengelolaan keanekaragaman hayati untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efektivitas; (d) memperbanyak ahli pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia; dan (e) meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, untuk berperan aktif dalam konservasi.

Laporan lengkap studi kasus praktik pengelolaan terbaik dapat diunduh di www.daemeter.org.

Sawit di Indonesia: Tata kelola, pengambilan keputusan, dan implikasi bagi pembangunan keberlanjutan

Ringkasan eksekutif



Konteks dan Latar Belakang Pemikiran Penelitian Ini

Sawit merupakan bagian yang sangat penting dalam strategi pembangunan Indonesia dan menjadi sumber banyak manfaat pembangunan setempat. Namun, dampak-dampak sosial dan lingkungan hidup di masa lalu telah menimbulkan kritik dari dalam maupun luar negeri. Manfaat dan biaya ekonomi, sosial dan lingkungan hidup sawit ditentukan oleh berbagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh banyak pelaku di sepanjang mata rantai pasokannya. Analisis ini dimaksudkan untuk menggambarkan proses-proses pengambilan keputusan mengenai sawit di Indonesia dengan cara yang dapat dipahami oleh berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah, sektor swasta, LSM, konsumen internasional, dan donor. Laporan ini bertujuan untuk (a) memberikan perspektif yang berimbang guna membantu menjembatani para pendukung dan pengecam sawit, dan (b) menggarisbawahi peluang-peluang untuk menyelaraskan pengambilan keputusan agar lebih dekat dengan tujuan-tujuan Pembangunan Ekonomi Hijau Indonesia.

Penelitian ini memaparkan sebagian keputusan-keputusan utama yang diambil berbagai pelaku terkait pengembangan sawit, menjelaskan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi hasil pembangunan, dan merekomendasikan cara-cara untuk mendukung perbaikan kinerja. Informasi yang disajikan ini membentuk suatu dasar untuk melakukan dialog kebijakan dengan lebih memiliki informasi, dan meminta perhatian ditujukan kepada cara-cara konkrit memperbaiki keputusan-keputusan, dan dengan demikian memberi kepada para pelaku satu pemahaman mengenai peran mereka yang lebih mendalam dan bagaimana mereka dapat bekerja sama dengan lebih efektif untuk mencapai hasil-hasil tertentu.

Pendekatan Analitis

Penelitian ini mengidentifikasi titik-titik keputusan dan pelaku-pelaku utama yang terlibat dalam proses-proses utama pembuatan keputusan di bidang sawit, dan mengelompokkan titik-titik tersebut berdasarkan keputusan yang menentukan: (a) di mana izin sawit dikeluarkan; (b) bagaimana praktik-praktik perkebunan dan pengelolaan pabrik menentukan dampak operasinya terhadap lingkungan hidup; dan (c) bagaimana kerja sama antara perusahaan dan masyarakat setempat, termasuk kesepakatan dengan petani kecil, dibentuk dan beroperasi seiring waktu. Penelitian ini secara kualitatif menggambarkan hasil dari keputusan, dengan memusatkan perhatian kepada lima jenis hasil pembangunan dari sawit yang pada umumnya digarisbawahi dalam dokumen-dokumen perencanaan pemerintah dan di tempat-tempat lain: manfaat ekonomi setempat (Kabupaten), manfaat bagi masyarakat, tata kelola sawit yang lebih baik di tingkat kabupaten, dampak-dampak pada lingkungan alam, dan emisi karbon dari pengembangan sawit. Penelitian ini memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk mendukung hasil-hasil Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang terkait dengan kelima dimensi tersebut. Karena keadaan sangat bervariasi di berbagai daerah di Indonesia dan antara perkebunan, banyak di antara rekomendasi kami sebaiknya dilihat sebagai hipotesa-hipotesa sementara yang perlu diselidiki lebih lanjut melalui penelitian, dialog kebijakan, atau program-program uji coba.

Rekomendasi-rekomendasi Utama

Laporan ini menghasilkan beberapa rekomendasi utama untuk memperkuat tata kelola, praktik-praktik dan hasil-hasil pembangunan sawit, termasuk:

Catatan: KemenTan = Kementerian Pertanian, KemenHut = Kementerian Kehutanan, KemenLH = Kementerian Lingkungan Hidup, KemenKeu = Kementerian Keuangan

Rekomendasi Utama	Rekomendasi di bawahnya	Target Utama	Jangka Waktu dan Potensi Dampak
Masalah-masalah yang beririsan			
Bekerja sama untuk menjadikan ISPO bagian strategi pembangunan hijau di Indonesia yang berharga dan diakui di tingkat internasional.	Dukungan yang luas dari para pemangku kepentingan untuk ISPO bisa sangat membantu memastikan bahwa standar tersebut diterapkan dengan efektivitas maksimal.	KemenTan, ISPO, program-program multilateral	Jangka pendek dan berdampak sedang
	Meningkatkan kepemimpinan dari Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Indonesian Business Council for Sustainable Development (IBCSD) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk mendukung dan memperkuat ISPO.	KADIN, IBCSD, GAPKI	Jangka pendek
Memperkuat dan meningkatkan sistem-sistem pemerintah daerah untuk pengelolaan sektor sawit.	Badan-badan di pemerintah pusat dapat memperkuat arahan, pelatihan, dan program-program pendukung terkait untuk pemerintah kabupaten guna mengembangkan kapasitas yang lebih seragam untuk mengatur pengembangan sawit.	KemenTan	Jangka menengah
	Menyediakan pelatihan, data spasial yang lebih baik, serta alat-alat pendukung keputusan untuk perencanaan tata ruang dan pengembangan sawit di kabupaten.	KemenTan, BAPLAN	Jangka menengah
	Mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan manfaat dan biaya yang lebih lengkap ketika menerbitkan izin-izin sawit untuk memaksimalkan manfaat sekunder yang positif.	Bupati, pemerintah setingkat Dinas	Jangka menengah
Keputusan-keputusan yang menentukan di mana izin sawit diberikan			
Memperkuat dan meningkatkan sistem-sistem pemerintah daerah untuk pengelolaan sektor sawit.	Mengembangkan, menguji coba, dan mengimplementasikan sepenuhnya suatu sistem pendaftaran perizinan online yang transparan.	KemenTan, pemerintah tingkat Dinas	Jangka menengah-panjang
	Meninjau ulang dan memperbaharui Keputusan Bersama antara KemenTan dan Badan Pertanahan Nasional (1999) mengenai penerbitan Izin Lokasi.	KemenTan, Badan Pertanahan Nasional	Jangka menengah dan berdampak besar
Memperbaharui dan membuat kriteria kelayakan yang sepenuhnya dapat dioperasikan yang konsisten dengan tujuan-tujuan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Indonesia guna memastikan bahwa lahan yang tidak sesuai tidak digarap.	Mengembangkan kriteria kelayakan lahan bagi pengembangan sawit yang jelas di tingkat nasional yang mencakup pertimbangan sosial, fisik, keanekaragaman hayati dan emisi gas rumah kaca sebagai panduan bagi keputusan perizinan pemerintah daerah atas lahan yang termasuk dalam zona untuk pertanian.	KemenTan, KemenHut, KemenLH	Jangka menengah dan berdampak besar
	Meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan pengaruh proses penilaian dampak lingkungan.	KemenTan, Badan Pertanahan Nasional	Jangka menengah-panjang

Rekomendasi Utama	Rekomendasi di bawahnya	Target Utama	Jangka Waktu dan Potensi Dampak
Meningkatkan ketersediaan lahan yang sesuai dan berdampak rendah untuk pengembangan sawit.	Mengembangkan kriteria kelayakan lahan bagi pengembangan sawit yang jelas di tingkat nasional yang mencakup pertimbangan sosial, fisik, keanekaragaman hayati dan emisi gas rumah kaca sebagai panduan bagi keputusan perizinan pemerintah daerah atas lahan yang termasuk dalam zona untuk pertanian.	KemenTan, KemenHut	Jangka pendek dan berdampak besar
	Menyederhanakan dan mempercepat mekanisme-mekanisme yang membuat wilayah gundul dan berkarbon rendah dalam Kawasan Hutan dapat dijadikan lahan pertanian.	KemenHut, KemenTan	Berdampak besar
	Mengeksplorasi peluang-peluang untuk pabrik yang lebih kecil yang membutuhkan basis pasokan perkebunan yang lebih kecil.	KemenTan, CEO, kabupaten, CSO	Jangka menengah – panjang
Mengembangkan alat-alat hukum dan membangun kapasitas implementasi guna memperkuat pengelolaan kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi di lahan-lahan yang termasuk dalam zona untuk pertanian.	Memperkuat hak sesuai hukum bagi perusahaan perkebunan untuk mempertahankan dan mengelola kawasan-kawasan konservasi yang tidak ditanami di dalam wilayah HGU perkebunan.	KemenTan, KemenHut, kabupaten, ISPO	Jangka menengah – panjang dan berdampak besar
Keputusan-keputusan yang mempengaruhi dampak lingkungan hidup perkebunan dan pabrik			
Mengembangkan alat-alat hukum dan membangun kapasitas implementasi guna memperkuat pengelolaan lahan bernilai konservasi tinggi di lahan-lahan yang termasuk dalam zona untuk pertanian.	Menciptakan insentif-insentif keuangan bagi perusahaan-perusahaan untuk mempertahankan kawasan-kawasan yang tidak dikembangkan dalam perkebunan.	KemenTan, KemenKeu, RSPO, ISPO, KADIN, CEO	Jangka pendek dan berdampak sedang
	Mendorong pemerintah daerah untuk memberlakukan persyaratan tambahan untuk izin perkebunan sawit guna menjamin terlindunginya nilai-nilai lingkungan hidup atau nilai-nilai sosial setempat.	Pemerintah daerah, Bupati, DISBUN	Jangka menengah
	Mendukung upaya-upaya yang dipimpin swasta guna membuat sasaran-sasaran yang eksplisit dan progresif untuk pengelolaan kawasan-kawasan konservasi di dalam perkebunan sawit.	CEO, RSPO, KemenTan,	Jangka menengah
	Membuat perusahaan perkebunan lebih bertanggung jawab atas kontraktor-kontraktor yang disewa untuk membuka lahan dan memperbaiki sistem untuk mengelola kontraktor.	CEO	Jangka menengah

Rekomendasi Utama	Rekomendasi di bawahnya	Target Utama	Jangka Waktu dan Potensi Dampak
	Guna mengurangi tekanan penyerobotan lahan dari masyarakat setempat di wilayah-wilayah konservasi, perusahaan hendaknya mempertimbangkan untuk memberlakukan batas-batas sukarela mengenai seberapa luas lahan masyarakat yang mereka siap kembangkan sebagai perkebunan sawit.	CEO, ISPO	Jangka menengah
Mengembangkan langkah-langkah kebijakan dan alat-alat fiskal yang inovatif dan memberikan ganjaran untuk investasi dalam teknologi 'Zero Waste' untuk memaksimalkan dampak-dampak positif keseluruhan operasi pabrik.	Meningkatkan penggunaan praktik-praktik dan teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah terkini di industri sawit, mensyaratkan bahwa pelaku-pelaku berikut ini menjalankan sebagian atau semua keputusan berikut.	KemenTan, KemenLH, ISPO, CEO	Jangka menengah
	Menciptakan insentif fiskal dan finansial guna mempromosikan (a) penangkapan metana, (b) peningkatan penggunaan teknik-teknik Aplikasi Lahan untuk POME di mana sesuai, dan (c) teknologi-teknologi pembuatan kompos guna memanfaatkan produk sampingan berupa sampah padat secara produktif, menghasilkan listrik dan mengurangi penggunaan pupuk kimia.	KemenTan, KemenKeu, ISPO, RSPO	Jangka menengah
Meningkatkan kemungkinan bahwa lahan dialokasikan kepada perusahaan yang bertanggung jawab.	Mengaitkan akses lahan untuk pengembangan sawit tambahan dengan kinerja perusahaan yang baik sebelumnya.	KemenTan, ISPO	Jangka pendek dan kemungkinan berdampak besar
	Menjajaki mekanisme untuk menghapus keterlibatan calo-calo izin, perusahaan atau individu yang mengkhususkan pekerjaannya untuk memperoleh izin, membuka lahan dan kemudian menjual izinnya ke pihak lain.	KemenTan, kabupaten, Bupati	Jangka menengah
Mendorong investasi untuk meningkatkan hasil lahan dan memberikan ganjaran atas kinerja yang baik guna mengoptimalkan produksi pada perkebunan yang sudah ada maupun di masa datang.	Mendorong peningkatan hasil CPO di seluruh industri dengan mendorong pelaku-pelaku tertentu untuk menjalankan sebagian atau semua keputusan berikut.	KemenTan, CEO	Jangka pendek dan berdampak tinggi

Rekomendasi Utama	Rekomendasi di bawahnya	Target Utama	Jangka Waktu dan Potensi Dampak
Keputusan-keputusan yang mempengaruhi hubungan perusahaan dengan masyarakat di sawit			
Memastikan bahwa masyarakat memiliki informasi yang memadai dan mampu berpartisipasi secara efektif dalam negosiasi dengan perusahaan sawit sejak tahap pengembangan yang paling awal, termasuk konsultasi-konsultasi sebelum penerbitan izin.	Membuat pemerintah bertanggung jawab atas kewajiban menyediakan informasi yang akurat dan mudah dipahami bagi petani kecil dan anggota masyarakat.	KemenTan, kabupaten, bupati	Jangka menengah –panjang dan berdampak besar
	Mengembangkan panduan untuk menetapkan suatu pendekatan yang lebih terstruktur bagi pemerintah daerah untuk mendukung sosialisasi perusahaan dan kemudian negosiasi.	KemenTan, Kabupaten, Bupati, CSO	Jangka menengah
	Mengembangkan serangkaian panduan standar untuk berhubungan dengan masyarakat.	KemenTan, ISPO, CSO	Jangka menengah dan berdampak besar
	Meninjau dan mengklarifikasi syarat minimum pembagian lahan antara Perusahaan dan Masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KemenTan No. 26 (2007).	KemenTan	Jangka pendek
	Melalui program uji coba, mengembangkan mekanisme bagi pemerintah kabupaten untuk memberikan dukungan negosiasi bagi setiap pihak selama penyusunan kesepakatan-kesepakatan pembagian manfaat, khususnya perjanjian kerja sama dengan petani kecil.	KemenTan, kabupaten, bupati, CSO	Jangka menengah dan berdampak besar
	Mengembangkan perjanjian yang jelas dan mengikat antara perusahaan dengan masyarakat mengenai di mana dan kapan lahan-lahan petani kecil akan dikembangkan.	Kabupaten, CEO, CSO, ISPO	Jangka pendek
	Mengembangkan dan mensyaratkan digunakannya model perjanjian pembebasan lahan dan perjanjian kemitraan dengan petani kecil.	Kabupaten, CEO, CSO, ISPO	Jangka menengah
	Memperjelas dan memperkuat pengawasan kewajiban-kewajiban perusahaan perkebunan untuk mendukung hasil petani kecil dan menciptakan insentif-insentif yang mendukung kepatuhan pada aturan-aturan yang ada.	KemenTan, ISPO, CEO	Jangka menengah dan berdampak besar
Mengembangkan langkah-langkah untuk memastikan tingkat manfaat bagi masyarakat selama penerapan perjanjian kemitraan dengan petani kecil sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dinegosiasikan.	Mendukung pelatihan petani kecil yang efektif oleh pemerintah kabupaten, pelatihan petugas penyuluhan lapangan, perusahaan perkebunan, yang didukung pendanaannya oleh pengguna dan pembeli produk-produk sawit.	Kabupaten, CEO, ISPO, RSPO, CSO	Jangka menengah
	Penciptaan lapangan kerja atau bentuk dukungan pendapatan masyarakat lainnya selama masa sawit tumbuh dewasa hendaknya disepakati antara perusahaan dengan masyarakat selama sosialisasi untuk pembebasan lahan.	KemenTan, CEO, ISPO	Jangka menengah

Rekomendasi Utama	Rekomendasi di bawahnya	Target Utama	Jangka Waktu dan Potensi Dampak
	Mempertimbangkan pengembangan dan penggunaan suatu sistem penentuan harga tandan buah segar (fresh fruit bunch) yang lebih fleksibel dan transparan yang juga lebih mudah dipahami petani kecil dan yang menciptakan peluang untuk bayaran berbasis prestasi yang memberi ganjaran untuk buah berkualitas baik.	KemenTan, Provinsi, GAPKI	Jangka menengah

Bagian ini diambil dari Paoli G.D., P. Gillespie, P.L. Wells, L. Hovani, A.E. Sileuw, N. Franklin dan J. Schweithelm (2013) Sawit di Indonesia: Tata kelola, pengambilan keputusan, dan implikasi bagi pembangunan keberlanjutan. The Nature Conservancy, Jakarta, Indonesia. Laporan selengkapnya bisa diunduh di www.tnc.org dan www.daemeter.org. Sebuah studi untuk menindaklanjuti publikasi ini diharapkan akan selesai dan dapat diunduh pada tahun 2015.

